

Evaluasi Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) di Kabupaten Timor Tengah Utara

Fidelis Atanus^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia.

Article Info

Article history:

Received 17 Maret 2017

Received in revised form 27 November 2017

Accepted 11 Januari 2018

Keywords:

Evaluasi
Implementasi
Kebijakan
Sari Tani

Abstrak

Pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-September 2017 di kabupaten TTU dengan tujuan melakukan evaluasi implementasi kebijakan Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) di kabupaten TTU. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan program Sari Tani dalam pengelolaan lahan kering yang meliputi mekanisme pelaksanaan, implementor dan indikator pencapaian. Situs penelitiannya adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten TTU dan semua kelompok tani penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen sedangkan teknik analisa datanya menggunakan teknik analisa data Miles dan Haberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan kebijakan Sari Tani di kabupaten TTU belum berjalan dengan baik, SDM yang dimiliki UPST tidak memadai dan kurangnya sosialisasi program serta pola rekrutmen PKM tidak melihat pada latar belakang pendidikan dan PKM yang dipilih tidak menetap di desa sehingga PKM tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan Pengembalian dana sari tani menjadi terhambat dikarenakan pemahaman dan kesadaran masyarakat belum baik, kesalahan pembentukan kelompok tani menjadikan dana tersebut tidak digulirkan. ©2018 dipublikasikan oleh Agrimor.

1. Pendahuluan

Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Sari Tani, bab I, pasal 1, ayat 5 menyebutkan bahwa Program Desa Mandiri Cinta Petani yang selanjutnya disingkat Sari Tani merupakan program penjabaran dari RPJMD tahun 2011-2015 yang dikordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yakni peningkatan kapasitas fiskal desa serta upaya penanggulangan kemiskinan desa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Menurut (Kehik *et al.*, 2016) dalam konteks implementasi kebijakan Sari Tani di Kabupaten TTU sebanyak 144 desa.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan Sari Tani belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal tersebut diindikasikan oleh koordinasi yang dilakukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Unit Pengelola Sari Tani (UPST) para beberapa desa tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, misalnya dalam melaksanakan fungsi kontrol peran UPST seharusnya berada di lapangan bersama kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan program Sari Tani akan tetapi, para aktor yang berperan dalam lembaga UPST ternyata tidak berasal dan menetap di Desa yang didampinginya akan tetapi berada pada tempat lain sehingga dalam menjalankan tugasnya UPST tidak secara rutin bersama dengan masyarakat dan sebagai dampaknya Dana Sari Tani tidak bergulir dan makin meningkatnya tunggakan Sari Tani pada kelompok-kelompok tani.

Hasil penelitian (Kehik *et al.*, 2016) menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan yang telah direncanakan oleh BPMPD tidak maksimal diimplementasikan dikarenakan terkendala beberapa hal diantaranya kurangnya kesadaran penerima manfaat dalam mengembalikan dana Sari Tani untuk digulirkan kembali. Implementor kebijakan program Sari Tani kurang profesional dalam mengimplementasikan program Sari Tani karena kurang memberikan sosialisasi mengenai program tersebut sehingga banyak masyarakat takut dalam menggunakan dana Sari Tani tersebut. Indikator pencapaian yang ditargetkan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini ditunjukkan dengan penerima manfaat tidak memahami tujuan pengelolaan dana Sari Tani secara baik, dan kelompok penerima sasaran belum maksimal menerapkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai usahatani yang dikembangkan.

Sumber Daya Manusia adalah suatu masalah yang serius, hal tersebut dapat dilihat dari lembaga UPST yang telah dibentuk di desa-desa ternyata tidak memahami tugas dan fungsinya secara baik sehingga terdapat beberapa kelompok tani yang tidak mendapatkan pengawasan secara baik. Menurut Bekun & Tiza, (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan Sari Tani belum berjalan baik yang disebabkan karena 1) masyarakat masih memosisikan dirinya sebagai obyek dalam program Sari Tani, sehingga cenderung untuk tidak pro aktif dalam pengelolaan dana; 2) Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) belum memahami tupoksinya secara baik dan benar; 3) Unit Pelaksana Sari Tani (UPST) belum memahami tupoksinya secara baik dan benar; 4) Rendahnya dukungan Pemerintah Desa; 5) Sikap dan perilaku masyarakat yang masih terikat dengan budaya (adat istiadat) sehingga pola pikir terhadap program Sari Tani belum memadai.

Sebagai kawasan perbatasan dengan Negara Demokrat Timor Leste, maka kabupaten TTU adalah salah satu cermin pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sudah sepatutnya pembangunan di kabupaten TTU mendapat prioritas melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Taena, (2009) menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya perlu diarahkan pada suatu model pengembangan ekonomi wilayah yang tepat agar dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian yang ada maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian dengan topik "Evaluasi Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) di Kabupaten TTU". Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi implementasi kebijakan Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) di kabupaten TTU.

2. Metode

Penelitian dilakukan pada bulan Juli-September 2017 di kabupaten Timor Tengah Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan program Sari Tani dalam pengelolaan lahan kering yang meliputi mekanisme pelaksanaan, implementor dan indikator pencapaian. Situs penelitiannya adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten TTU dan semua kelompok tani penerima manfaat. Untuk mencapai validitas data kualitatif digunakan metode sensus pada tiga kecamatan yang mewakili tiga keftoran TTU.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen sedangkan teknik analisa datanya menggunakan teknik analisa data Miles dan Haberman sesuai petunjuk (Sugiyono, 2006) dengan langkah 1) *Data collection (Koleksi data)*; 2) *Data Reduction (Reduksi data)*; 3) *Data Display (Penyajian data)*; dan *Conclusions drawing/verification*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mekanisme Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sari tani mengenai mekanisme pelaksanaan Sari Tani dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, sistem pembiayaan tidak sesuai, minimnya pemahaman masyarakat dan lemahnya kesadaran masyarakat serta kondisi gagal panen tahun 2015-2016.

a. Sistem Pembiayaan Tidak Sesuai dengan Mekanisme

Sistem pembiayaan Sari Tani merupakan suatu langkah penting dalam pengelolaan Sari Tani karena merupakan dasar bagi masyarakat untuk mengembangkan produk unggulan kabupaten. Kesalahan pembiayaan Sari Tani disebabkan karena tidak dilakukannya verifikasi dan identifikasi untuk mengecek kelayakan ternak yang dibeli sehingga pada saat penjualan keuntungan yang diperoleh masyarakat sedikit bahkan tidak ada. Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak dilakukannya identifikasi secara baik pada anggota kelompok tani sehingga terdapat sebagian masyarakat yang berbohong dalam hal ini masyarakat tidak membeli ternak dan uang yang ada mereka gunakan untuk keperluan rumah tangga. Ketika Tim kecamatan melakukan pengecekan terhadap ternak yang dibeli, mereka menunjuk ternak mereka sendiri. Hal seperti ini menggambarkan kurang mendukungnya pemerintah dalam hal ini pemerintah di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa terhadap pelaksanaan kebijakan sari tani sehingga tidak dilakukannya identifikasi kelayakan ternak. Menurut Ali, (2017) salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar beberapa institusi pelaksana.

b. Minimnya Pemahaman Masyarakat

Rendahnya sosialisasi program kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadikan kebijakan sari tani tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Lemahnya sosialisasi program dibuktikan dengan beberapa orang saja dalam satu kelompok yang mengetahui secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan sari tani secara baik. Pemahaman masyarakat yang minim tersebut disebabkan oleh ketidakpedulian perangkat desa untuk menjelaskan kebijakan sari tani kepada masyarakat melalui penyampaian informasi dan penjelasan mekanisme pelaksanaan kebijakan sari tani kepada masyarakat. Kenyataannya sosialisasi tidak berjalan dengan baik karena ketidakpedulian aparat desa terhadap pelaksanaan sosialisasi kebijakan sari tani. Sebagai dampaknya masyarakat tidak memahami secara baik mengenai mekanisme pelaksanaan Sari Tani sehingga masih banyak tunggakan yang belum dikembalikan oleh masyarakat. Untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Menurut Purwanto & Sulistyastuti, (2012), tujuan pemberian informasi ini adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka

tidak hanya akan dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan.

c. Lemahnya Kesadaran Masyarakat

Lemahnya kesadaran masyarakat dapat dibuktikan dengan tidak adanya kemauan masyarakat untuk mengikuti pertemuan dan rapat kelompok tani serta keterlibatan masyarakat yang kurang baik dalam mengelola program tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dapat dilihat saat UPST melakukan penagihan. Sebagian masyarakat malas tahu dan memberikan alasan-alasan agar tidak membayar pinjaman tersebut sebagai dampaknya dana yang digulirkan menjadi macet dan tidak dikembalikan. Dalam dokumen kebijakan sari tani bahwa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, program sari tani memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk terlibat aktif dalam mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini masyarakat tidak diposisikan sebagai penerima bantuan pengentasan kemiskinan, namun lebih dari itu, masyarakat merupakan pelaku pengentasan kemiskinan. Kenyataannya masyarakat tidak menganggap bahwa ia sebagai pelaku pengentasan kemiskinan sehingga kesadaran masyarakat dalam mengikuti aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sangat minim.

Fenomena implementasi kebijakan di atas menggambarkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan desa mandiri cinta petani dipengaruhi pula oleh faktor kesadaran masyarakat dalam menerima dan menjalankan program tersebut. Menurut Purwanto & Sulistyastuti, (2012) peluang dihasilkannya implementasi kebijakan yang baik adalah ketika suatu kebijakan yang diimplementasikan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

d. Kondisi Gagal Panen

Kedadaan iklim pada tahun 2015 dan 2016 menyebabkan hampir semua masyarakat yang mengelola lahan pertanian seperti sawah mengalami gagal panen sehingga untuk pengembalian dana Sari Tani menjadi tertunda karena masyarakat menggunakan uang yang ada untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Subarsono, (2008) berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah karakteristik geografi seperti sumber daya alam dan iklim.

Dalam hal ini implementasi kebijakan sari tani tidak memprediksi iklim yang akan terjadi sehingga dapat dilakukannya penyesuaian kebijakan yang diimplementasikan. Kondisi yang terjadi adalah kondisi gagal panen yang dialami hampir sebagian besar masyarakat baik yang mengolah lahan pertanian bukan sawah maupun yang mengolah lahan pertanian sawah.

3.2 Implementor Kebijakan

Hasil penelitian berkaitan dengan implementor kebijakan ditemukan permasalahan dalam implementasi kebijakan yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain rendahnya kapasitas SDM yang dimiliki Unit Pengelola Sari Tani (UPST), kurang dilakukan sosialisasi program, serta pola rekrutmen Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) yang tidak melihat pada latar belakang pendidikan serta tempat tinggal PKM tidak diperhatikan sehingga masyarakat tidak mendapatkan pendampingan saat mengelola DST. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengenai implementor kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diuraikan sebagai berikut:

a. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki UPST

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Subarsono, (2011), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Hasil observasi terkait SDM yang dimiliki UPST menunjukkan bahwa, SDM yang dimiliki UPST sangat minim. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan kebijakan mengenai DST yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Desa Mandiri Cinta Petani (JUKNIS SARI TANI). Hal lain seperti tidak pahamnya tugas dan fungsi UPST menyebabkan lembaga UPST tidak berjalan dengan baik sehingga hanya ketua yang menjalankan tugasnya sedangkan anggota lain tidak bekerja sama sekali.

Kenyataannya UPST tidak memahami tugasnya secara baik karena SDM yang dimiliki UPST sangat minim sehingga tidak melaksanakan tugasnya seperti verifikasi usulan nama-nama kelompok KEDST sehingga adanya beberapa aparat desa yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Tidak dilakukannya pengumpulan komoditas anggota kelompok untuk dipasarkan, tidak memfasilitasi masyarakat dalam pembentukan KSM dan tidak dilakukannya Koordinasi dengan instansi, PPL dan PKM sehingga ketika ada hambatan dalam pengelolaan DST seperti ada ternak yang sakit tidak adanya pemberian obat kepada ternak tersebut. Sebagai dampaknya banyak ternak yang mati. Pada akhirnya berdampak pada pengembalian Dana Sari Tani. Penyampaian laporan kepada pemerintah di tingkat kecamatanpun nampaknya hanya sebagai formalitas yang dilakukan setiap periode tertentu. Menurut Purwanto &

Sulistyastuti, (2012) komitmen dan kompetensi merupakan dua persyaratan penting (dua sisi dari satu mata uang) yang harus dimiliki oleh personel yang diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:151).

Dengan demikian implementasi kebijakan mengenai implementor kebijakan dapat disimpulkan bahwa tidak dimilikinya komitmen dan kompetensi oleh para implementor kebijakan menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Jika adanya kompetensi dan komitmen para implementor maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik.

b. Kurang Dilakukan Sosialisasi Program

Kurangnya sosialisasi menyebabkan pemahaman masyarakat minim sehingga ketika kebijakan diimplementasikan maka tidak dapat berjalan dengan baik karena masyarakat tidak sepenuhnya memahami mekanisme dan jenis kegiatan serta substansi dari kebijakan tersebut. Hasil observasi peneliti terkait dengan sosialisasi program. Para implementor kebijakan dalam hal ini pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi program kepada masyarakat karena tidak adanya kerja sama antara sesama aparat desa dan diterapkannya budaya kerja formalitas dimana ketika Camat hadir di desa tersebut barulah mereka akan bertindak seakan-akan mereka melakukan hal tersebut setiap periode. Sosialisasi adalah aspek penting dalam keberhasilan berjalannya suatu kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika tanpa adanya sosialisasi dalam Organisasi (internal) maupun (eksternal) dalam pelaksanaan, sehingga Koordinasi antara instansi yang terkait bisa berjalan dengan baik berhubungan dengan kebijakan. Tujuan Sosialisasi ini adalah menyebarkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan.

Permasalahan implementasi kebijakan menyebabkan tujuan dari kebijakan tersebut tidak dapat tercapai dengan baik. Tidak dilakukan sosialisasi secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan sehingga koordinasi antar implementor baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan yang tidak didahului oleh sosialisasi menyebabkan pemahaman masyarakat terbatas dan koordinasi antar aktor pelaksanaanpun tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya penyebaran informasi terkait tujuan program.

c. Pola Rekrutmen PKM Tidak Berdasarkan Pada Kualifikasi Pendidikan

Dengan bidang tugas yang diemban SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan misinya. Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, ada dua jalur yang biasanya ditempuh, yaitu pertama melalui sistem seleksi ketat dengan persyaratan tertentu untuk suatu bidang pekerjaan; dan kedua melalui pendidikan/pelatihan tambahan setelah menjadi karyawan atau melalui model magang (*learning by doing*). Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Sari Tani terkait dengan implementor kebijakan ditemukan bahwa pola rekrutmen PKM yang tidak berdasarkan pada kualifikasi pendidikan menyebabkan pelaksanaan kebijakan Sari Tani menjadi terhambat. Hasil studi terhadap dokumen kebijakan bahwa kriteria dipilihnya seseorang untuk menduduki jabatan sebagai PKM adalah pendidikan minimal D3/S1 dari disiplin ilmu pertanian, penermakan dan perikanan dan bersedia tinggal di desa sasaran program DST.

Kenyataannya pola rekrutmen PKM tidak berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan latar belakang pendidikan, sebagian besar PKM tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kriteria PKM. Ditemukan bahwa, latar belakang pendidikan PKM adalah ilmu pertanian sedangkan usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani di Kabupaten TTU adalah ternak sapi dan babi sehingga tidak adanya sinkronisasi antara latar belakang pendidikan PKM dengan produk unggulan yang dikembangkan masyarakat.

Berkaitan dengan tempat tinggal ditemukan bahwa hampir di seluruh desa di kecamatan Insana Tengah PKM-nya tidak tinggal menetap di desa melainkan PKM adalah warga di desa atau tempat lain sehingga PKM tidak melakukan pendampingan secara rutin kepada anggota penerima manfaat. Menurut Keban, (2004) variabel kemampuan anggota untuk mensistematisasi proses implementasi mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan, ketepatan alokasi sumber daya, keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, aturan keputusan dari badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, dan akses formal pihak luar. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, dan komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Pelaksanaan kebijakan mengenai implementor kebijakan di kecamatan Insana Tengah bahwa, kurangnya SDM yang berkualitas sebagai akibat dari tidak dilakukannya sistem seleksi ketat terhadap PKM dengan persyaratan tertentu untuk suatu bidang pekerjaan sehingga tidak dapat membantu masyarakat apabila ternak yang dipelihara terjangkit penyakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan desa mandiri cinta petani mengenai implementor kebijakan menjadi terhambat karena tidak adanya komitmen dan kompetensi yang dimiliki UPST, tidak adanya kerja sama antar sesama aparat desa menyebabkan tidak dilakukannya sosialisasi kebijakan kepada kelompok penerima manfaat dan pola rekrutmen PKM tidak berdasarkan pada tingkat pendidikan yang sesuai.

Jika adanya kompetensi dan komitmen para implementor kebijakan maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan pentingnya sosialisasi sebelum kebijakan diimplementasikan sehingga koordinasi antar aktor

pelaksanaan dapat berjalan dengan baik serta kurangnya SDM yang berkualitas dari para implementor, karena tidak dilakukannya sistem seleksi ketat dengan persyaratan tertentu untuk suatu bidang pekerjaan dan melalui pendidikan/pelatihan tambahan setelah menjadi pelaksana atau melalui model magang (*learning by doing*).

Taena, W. 2009. *Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan District Enclave Oekusi*. Tesis. Institut Pertanian Bogor.

3.3 Indikator Pencapaian

Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki (kemiskinan, kondisi kesehatan keluarga miskin yang buruk, ketidakmampuan keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok dan sebagainya) menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki (lebih sejahtera, derajat kesehatan keluarga miskin lebih baik, kemampuan keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok yang lebih baik) (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian dana sari tani menjadi terhambat dikarenakan kesadaran masyarakat belum baik serta kondisi gagal panen menjadikan dana tersebut tidak digulirkan.

Masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan sari tani mengenai indikator pencapaian adalah kesadaran masyarakat dapat dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat yang minim ditunjukkan dengan tidak lancarnya pembayaran pinjaman dana Sari Tani oleh anggota kelompok tani. Tidak lancarnya pembayaran ini selain dikarenakan sikap masyarakat yang apatis, juga disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga dimana masyarakat memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga sebagian dana sari tani dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hasil observasi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melunasi pinjaman sari tani sangat minim karena sikap dan perilaku masyarakat yang tertutup dan masih tradisional. Tertutup dalam artian masyarakat walaupun memiliki uang tetapi tetap ber alasan bahwa tidak memiliki uang. Tradisional dalam artian apabila salah satu masyarakat tidak membayar pinjaman sari tani maka semua masyarakat juga tidak akan membayar pinjaman tersebut. Menurut Ali, (2017), sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Keterangan hasil penelitian dan paparan teori di atas menggambarkan bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan akan sulit jika bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat. Dalam kaitannya dengan kebijakan sari tani sikap masyarakat yang tertutup dan tradisional ini harus diikat oleh suatu aturan sehingga dapat mengubahnya secara keseluruhan. Hasil studi terhadap dokumen kebijakan bahwa tidak adanya aturan yang mengatur soal pengembalian dan sanksi kepada anggota penerima manfaat untuk mengembalikan dana tersebut. Hal tersebut dijadikan sebagai suatu celah dimana masyarakat tidak merasa terikat oleh suatu aturan sehingga masyarakat merasa bebas dan membayar pinjaman DST tersebut dengan sesuka hati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya aturan yang mengikat mengenai pengembalian DST menyebabkan sikap dan perilaku masyarakat sulit untuk diubah dan kemudian memberikan dampak yang negatif terhadap pengembalian dana sari tani. Pelaksanaan kebijakan akan dicapai tujuannya dengan baik apabila kebijakan yang diimplementasikan tidak bertujuan untuk merubah pola hidup masyarakat sebaliknya kebijakan yang diimplementasikan akan dicapai tujuannya apabila disesuaikan dengan kreativitas masyarakat dan disesuaikan dengan keterampilan masyarakat.

4. Simpulan

Mekanisme pelaksanaan kebijakan Sari Tani di kabupaten TTU belum berjalan dengan baik, SDM yang dimiliki UPST tidak memadai dan kurangnya sosialisasi program serta pola rekrutmen PKM tidak melihat pada latar belakang pendidikan dan PKM yang dipilih tidak menetap di desa sehingga PKM tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan Pengembalian dana sari tani menjadi terhambat dikarenakan pemahaman dan kesadaran masyarakat belum baik, kesalahan pembentukan kelompok tani menjadikan dana tersebut tidak digulirkan.

Pustaka

- Ali, M. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Bekun, S. & Tiza, A.L. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Transformasi Nilai-Nilai Kewirausahaan dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Cinta Petani (Sari Tani) di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara*. *AGRIMOR*, 2(01): 4–9.
- Keban, Y.T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kehik, B.S., Kolne, S.V. & Atanus, F. 2016. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Desa Mandiri Cinta Petani di Kabupaten Timor Tengah Utara*. *AGRIMOR*, 1(04): 75–77.
- Purwanto, E.A. & Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, A. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.